**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Landasan Teori**

Landasan teori ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), PSAP NO 71 tahun 2010, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi informasi (TI). Bagian ini menjelaskan teori yang melandasi penelitian yang sedang dilakukan dan beberapa penelitian terdahulu yang dikembangkan atau diperluas dengan referensi keterangan tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian.

* + 1. **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Shahwan (2008) menyatakan bahwa tujuan dasar dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selain itu, menekankan bahwa informasi yang disajikan dapat berguna jika laporan keuangan menunjukkan realitas ekonomi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengguna. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan “Bahwa terdiri atas empat karakteristik prasyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami”. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

memperngaruhi pengambilan keputusan

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

* + 1. **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat Internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku. SAP merupakan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite Standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelahterlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP pada pemerintah daerah. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat dua belas Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai berikut:

1. PSAP No. 01 (Penyajian Laporan Keuangan) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. PSAP No. 02 (Laporan Realisasi Anggaran)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

3. PSAP No. 03 (Laporan Arus Kas)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1. PSAP No. 04 (Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL) Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

5. PSAP No. 05 (Akuntansi Persediaan)

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah.

6. PSAP No. 6 (Akuntansi Investasi)

Dengan menggunakan metode biaya investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Kemudian dengan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan, untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

7. PSAP No. 07 (Akuntansi Aset Tetap)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

8. PSAP No. 08 (Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan)

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

9. PSAP No. 09 (Akuntansi Kewajiban)

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

10.PSAP No. 10 (Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan) Dalam menyususun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan pernyataan standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL) Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK.

11.PSAP No. 11 (Laporan Keuangan Konsolidasian)

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

12.PSAP No. 12 (Laporan Operasioanl)

Laporan Operasional memnyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari entitas pelaporan yang penyajianya disandingkan dengan priode sebelumnya.

* + 1. **Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)**

Arens (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas

kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaranya. Komponen pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang SPIP, menjelaskan tentang beberapa poin penting antara lain :

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

3. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur :

a. Lingkungan pengendalian;

b. Penilaian risiko;

c. Kegiatan pengendalian;

d. Informasi dan komunikasi;

e. Pemantauan pengendalian intern.

5. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

b. Pembinaan sumber daya manusia;

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui (a) penegakan integritas dan nilai etika (b) komitmen terhadap kompetensi (c) kepemimpinan yang kondusif (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia (g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait (Irwan, 2011).

* + 1. **Kompetensi Sumber Daya Manusia (*Human Resources)***

Watson Wyatt sebagaimana dikutip Ruky (2003) kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku (*attitude*) yang dapat diamati dan di terapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Dengan demikian kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang telah menjadi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam menghadapi permasalahan, yang dapat diukur dari kemampuanya untuk menjadi pelaku kinerja yang efektif.

Periansya (2016) Kompetensi didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai oleh seseorang dan telah menjadi bagian dari dia / dirinya, sehingga dia dapat melakukan kognitif, perilaku afektif dan psikomotor sebaik mungkin.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap prilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan jabatanya (Safri, 2002). Hal ini sejalan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kopetensi jabatan struktural PNS yang menyebutkan bahwa: ”Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatanya, sehingga PNS tersebut dapat melaksankan tugas-tugasnya dengan profesional, efektif dan efesien”.

Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2008) Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan (Mahaputra dan Putra, 2014).

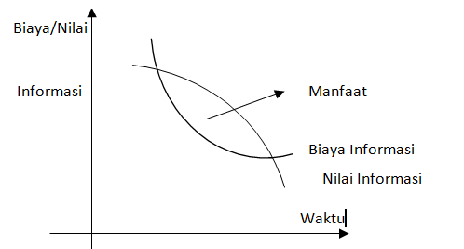
**2.1.5 Pemanfaatan Teknologi informasi (TI)**

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000) Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya dalam (Indriasari dan Nohartyo, 2008).

**2.1.4.1 Peningkatan Nilai Informasi**

Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan. Peningkatan nilai informasi tersebut bisa kita amati dari hal sebagai berikut (Wahana Komputer, 2003) dalam (Indriasari dan Nohartyo, 2008).

1. **Hubungan antara Nilai Informasi, Biaya, dengan Waktu pengolahan data menjadi informasi.**

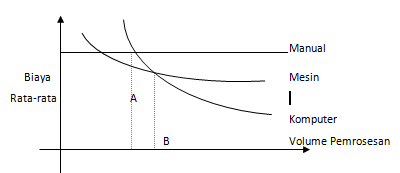
****

**Gambar 2.1**

**Hubungan Biaya, Nilai, dan Waktu**

Dari grafik yang menunjukkan hubungan antara biaya, nilai, dan waktu pengolahan informasi, maka dapat diihat informasi yang memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disajikan dalam waktu yang cepat dan tepat. Dengan bantuan komputer pengolahan data bisa diatur sedemikian rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih di bawah manfaat itu sendiri.

1. **Hubungan antara Biaya dengan Volume pemrosesan data menjadi informasi.**

****

**Gambar 2.2**

**Hubungan Biaya dan Volume Pemrosesan**

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika ditinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa pemrosesan secara manual memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan menggunakan mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya, namun pada perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tetap menjaga volume. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan komputer, akan dapat terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang paling rendah dibandingkan dengan metoda pengolahan yang lain. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN.

Yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson *et al.,* 2000):

1. pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
2. keakurasian dalam perhitungan dan pembandingan lebih besar,
3. kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
4. penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu,
5. tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
6. pilihan pemasukan data dan penyediaan *output* lebih luas/banyak, dan
7. produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak (Pujonggo, 2004).

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Indonesia Memasuki Area Pemerintahan Daerah yang Baru, maksudnya setiap daerah diberi kewenangan untuk menjelaskan berdasarkan PAD. Perubahan yang cukup fundanmental terjadi didalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan konsep otonomi daerah yang tercantum di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tentunya membawa perubahan juga terhadap pegelola keuangan negara sehubungan dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengatur sendiri mengenai pengelolaan keuangan daerahnya.

SAP merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite Standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelahterlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadi acuan agar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau pusat sesuai dengan aturan yang ditetapkan berdasarkan penerapan standar akuntansi pemerintah.

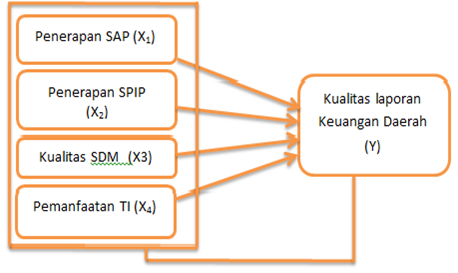
Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 SPIP adalah system pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam hal ini system pengendalian intern harus di terapkan oleh setian instansi agar tercapainya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bahwasannya Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Dan Bupati/Walikota Wajib Melakukan Pengendalian Atas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan.

Watson Wyatt sebagaimana dikutip Ruky (2003) kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku (*attitude*) yang dapat diamati dan di terapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Dengan demikian kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang telah menjadi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam menghadapi permasalahan, yang dapat diukur dari kemampuanya untuk menjadi pelaku kinerja yang efektif. Sehingga kompetensi yang dimiliki oleh pegawai akan memberikan masukan yang positif dalam penyusunan laporan kuangan pemerintah daerah.

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000) Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi, agar kaulitas laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami dan di susun oleh pengelola laporan keuangan maka sangat diperlukannya suatu pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan “Bahwa terdiri atas empat karakteristik prasyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami”, yang sesuai dengan peraturan perundang-undang, peraturan pemerintah, dan standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas bisa kita lihat terdapat hubungan antara variabel yang akan di ambil oleh peneliti dan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variable bebas yaitu penerapan SAP, penerapan SPIP, Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dapat dilihta pada gambar sebagai berikut :

****

**Gambar 2.3**

**Paradigma Pemikiran**

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai judul yang diambil.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| Nugraheni Dan  Subaweh,  (2008) | Pengaruh  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap Kualitas  Laporan Keuangan | Variabel independen yaitu PSAP.  Variabel Dependen Yaitu Kualitas Laporan Keuangan. | Terdapat Pengaruh Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Di  Inspektorat Jenderal Departemen  Pendidikan Nasional Terhadap Peningkatan  Kualitas Laporan Keuangan |
| Winidyaningrum Dan Rahmawati ,(2010) | Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Informasi Teknologi Pemanfaatan Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variable Interventing Pengendalian Internal Akuntansi. | Variabel Independen SDM, TI, Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.  Variabel Dependen Yaitu Pengendalian Internal Akuntansi. | Hasil Penelitiannya Menyatakan Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tetapi Tidak Signifikan Terhadap Ketepatan Waktu.Pemanfaatan TI Berpengaruh Positing Signifikan Terhadap Keterandalan Pelaporan Ketepatan Waktu. |
| Irwan, (2011) | Pengaruh Penerapan  Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah,  Kompetensi Sumber  Daya Manusia Dan  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah  Terhadap Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah Provinsi  Sumatera Barat. | Variabel Independen Yaitu Penerapan SPI, Kompetensi SDM, PSAP. Variabel Dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah. | 1.Terdapat Pengaruh Yang Positif Dan Signifikan Antara Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  2.Terdapat Pengaruh Signifikan Dan Positif Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  3.Terdapat Pengaruh Signifikan Dan Positif Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  4.Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Secara Bersama-Sama Berpengaruh Signifikan Dan Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. |
| Karmila,  Tanjung Dan  Darlis, (2014) | Pengaruh Kapasitas  Sumber Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  Dan Pengendalian  Intern Terhadap  Keterandalan  Pelaporan Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi Pada  Pemerintah Provinsi  Riau) | Variabel Independen yaitu Kapasitas SDM, TI, Pengendalian Internal.  Variabel Dependen yaitu Keterandalan  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah | 1.Kapasitas Sumber Daya Manusia Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan.  2.Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan.  3.Pengendalian Intern Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan. |
| Mahaputra  Dan Putra,  (2014) | Analisis Faktor -Faktor Yang  Memengaruhi  Kualitas Informasi  Pelaporan Keuangan  Pemerintah Daerah | Variabel independen yaitu kapasitas SDM, TI, SPI, Implementasi SAP.  Variabel Dependen yaitu Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan | 1.Kapasitas Sumber  Daya Manusia  Berpengaruh Positif Dan Signifikan Pada  Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan  Di Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) Kabupaten Gianyar.  2.Pemanfaatan Sistem Informasi  Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Dan Signifikan Pada Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar  3.Sitem Pengendalian Intern Berpengaruf Positif Dan Signifikan Pada Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.  4.Implementasi Standar Akuntansi  Pemerintahan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Pada Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.. |
| Angraini Dan  Riduan,  (2014) | Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Keterandalan  Pelaporan Keuangan  Pemerintah Daerah | Variabel Independen yaitu SDM, TI, SPI. Variabel Dependen yaitu Keterandalan Pelaporan Keuangan. | 1.Sumber Daya Manusia Memiliki  Pengaruh Signifikan Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan  2.Pemanfaatan Teknologi Informasi  Tidak Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Keterandalan  Pelaporan Keuangan  3.Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Tidak Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan |

* 1. **Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, tujuan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis dari penelitian ini mengetahui pengaruh Penerepam SAP, SPIP, SDM dan TI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

H1 : PSAP Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keauangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan.

H2 : SPIP Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keauangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan.

H3 : Kualitas SDM Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keauangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan.

H4 : TI Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keauangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan.

H5 : PSAP, SPIP, SDM, TI Berpengaruh Secara bersama-sama Terhadap Kualitas Laporan Keauangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan.